

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

5.1 Kesimpulan

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan untuk melihat kinerja urusan pemerintah dimata masyarakat.
- b. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bangka terkait penilaian masyarakat sudah pada nilai **78,07** atau kategori **B (Baik)**. Untuk urusan pemerintah Bidang Kependudukan dengan nilai 88,93 (A), Bidang Kesehatan dengan nilai 85,33 (A), urusan Pendidikan dengan nilai 82,77 (A), urusan Sosial dengan nilai 79,37 (B), urusan Pertanahan dengan nilai 78,71 (B), urusan Pangan Pertanian dengan nilai 78,67 (B), urusan Pemuda dan Olahraga dengan nilai 78,49 (B).
- c. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangka dapat juga dilihat berdasarkan wilayah administratif (kecamatan). Dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka semua kecamatan mencapai kategori B (Baik).. Sedangkan wilayah kecamatan dengan IKM kategori C tidak ada lagi di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka. Adapun nilai IKM per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Nilai IKM Urusan Pemerintah per Kecamatan

URUSAN PEMERINTAH WAJIB DAN PILIHAN	IKM BANGKA	IKM KEC. SUNGAILIAT	IKM KEC. PEMALI	IKM KEC. MERAWANG	IKM KEC. MENDO BARAT	IKM KEC. PUDING BESAR	IKM KEC. BAKAM	IKM KEC. RIAU SILIP	IKM KEC. BELINYU
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88,93	89,93	89,51	88,52	88,63	88,59	88,78	88,64	88,83
KESEHATAN	85,33	86,77	84,32	84,70	88,55	81,00	85,70	82,68	88,94
PENDIDIKAN	82,77	84,63	82,38	82,74	83,23	81,63	81,72	81,93	83,86
SOSIAL	79,37	80,09	79,41	79,51	79,29	79,00	79,33	78,21	80,14
PERTANAHAN	78,71	79,81	78,74	77,77	79,43	78,57	77,11	79,02	79,23
PANGAN DAN PERTANIAN	78,67	80,33	74,96	78,02	79,64	78,85	78,96	78,70	79,91
KEPEMUDAAN DAN OLAHR	78,49	85,37	75,37	78,14	79,74	78,40	77,67	77,85	75,36
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	78,35	76,80	74,69	77,56	77,74	79,83	79,85	79,87	80,49
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA	78,21	81,46	78,79	77,55	78,85	77,21	76,53	77,12	78,14
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	77,80	77,31	75,88	78,37	78,85	77,57	77,86	77,75	78,81
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	77,80	78,60	77,28	76,59	76,10	78,80	77,44	79,02	78,57
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	77,67	78,78	77,59	76,30	77,41	78,40	76,67	78,71	77,53
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	77,6	78,80	73,83	77,73	77,02	79,10	77,54	79,05	77,72
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	77,46	77,80	79,94	77,72	77,60	77,60	74,16	79,30	75,55
USAHA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	76,98	78,35	76,79	77,41	77,37	77,15	71,81	78,97	77,97
PERIKANAN	76,78	77,67	76,84	77,49	77,13	77,08	73,15	78,82	76,03
PENANAMAN MODAL	76,63	76,79	76,31	76,42	77,36	77,20	73,02	79,72	76,26
LINGKUNGAN HIDUP	76,43	79,55	75,35	76,82	76,05	77,07	70,81	78,63	77,12
PERHUBUNGAN	76,25	78,61	75,17	76,73	76,68	75,88	74,07	77,60	75,22
TENAGA KERJA	75,9	76,25	72,07	76,48	76,01	75,65	76,91	77,92	75,87
PERDAGANGAN	75,35	77,98	73,77	77,38	74,12	77,68	67,16	79,47	75,21
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	74,89	76,43	72,66	75,38	70,40	76,30	73,67	79,12	75,12
IKM	78,47	79,91	77,35	78,42	78,51	78,57	76,81	79,46	78,72

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan beberapa permasalahan diatas, maka perlu disampaikan beberapa hal sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja urusan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangka , antara lain sebagai berikut :

- Untuk mewujudkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan OPD beserta seluruh tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut.

- b. Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan kinerja secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka survey Indeks Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan dan periodik di tahun-tahun mendatang. Sehingga berdasarkan hasil survey IKM tersebut, OPD dapat melakukan perbaikan mutu pelayanan dan kinerja sesuai hasil penilaian dari masyarakat.